

Implementasi Kebijakan Perguruan Tinggi di Masa Pandemi (Studi Banding: Pembelajaran Kriya Batik Indonesia – Malaysia)

Farid Abdullah^{1*}, Aneza Mohd Adnan²
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung^{1*}
Email: farid.abdullah@upi.edu
Universiti Teknologi MARA, Machang²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengetahui, studi banding, pada perguruan tinggi Indonesia – Malaysia terkait metode belajar mengajar di masa pandemi. Permasalahan pandemi Covid-19 merubah tatanan dan paradigma dalam kegiatan belajar di perguruan tinggi seluruh dunia. Kondisi pandemi ini juga menimpa Indonesia dan Malaysia, yang merespon dengan metode belajar mandiri untuk perguruan tinggi. Pada saat yang sama Kementerian Pendidikan Indonesia mengeluarkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) di Indonesia dan *Week Without Wall* di Universiti Teknologi MARA, Machang, Malaysia. Studi banding implementasi di lapangan, khususnya pada pembelajaran Kriya Batik pada kedua perguruan tinggi. Metodologi yang dipergunakan adalah deskriptif-kualitatif, melalui wawancara pengajar dan mahasiswa peserta pada pelajaran Kriya Batik kedua perguruan tinggi. Hasil yang diharapkan adalah masukan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait implementasi kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Temuan dari tulisan ini adalah pentingnya sikap adaptif, inovatif, dan realitis dalam melaksanakan pembelajaran perguruan tinggi di masa pandemi.

Katakunci: kebijakan, implementasi, Indonesia – Malaysia, batik

1. Pendahuluan

Permasalahan pendidikan sangat terkait erat dengan kebijakan (*policy*) pemerintah. Termaktub pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia nomor 2, tahun 1989, menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia, baik secara sosial, intelektual, spiritual, maupun kemampuan profesional (Sa'ud, 2002). Permasalahan kebijakan pendidikan, khususnya Indonesia – Malaysia di masa pandemi saat ini dapat menjadi cermin untuk saling menguatkan satu sama lain dan menuju kebaikan sistem pendidikan kedua belah pihak negeri serumpun.

Pada Pembukaan Konferensi Forum Rektor (FRI) Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo virtual di istana Bogor, 4 Juli 2020, mengakui permasalahan pendidikan tinggi sangat kompleks. Presiden menyebutkan permasalahan perguruan tinggi yang

kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana, jumlah koleksi pustaka, hingga ruang kelas yang tidak layak. Presiden meyakini Forum Rektor Indonesia memiliki peran besar dalam memajukan pendidikan tinggi di masa pandemi Covid-19. Peran besar FRI tidak sebatas sebagai forum komunikasi, namun juga saling berbagi, seperti koleksi perpustakaan, pertukaran dosen, hingga perkuliahan secara daring. Presiden juga berharap kerja sama pendidikan tinggi dengan industri di bidang penelitian dan pengembangan teknologi (merdeka.com, 2020).

Saat ini Indonesia menghadapi masalah pokok pendidikan, seperti rendahnya mutu lulusan (*quality*) perguruan tinggi, masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (*equity*) dan relevansi antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kompetensi persyaratan dari dunia kerja. Belum sinkronnya antara desain dan implementasi pendidikan tinggi, perlu didorong untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi holistik baik *softskill* maupun *hardskills*. Permasalahan pokok pendidikan ini memperlihatkan masih banyaknya 'pekerjaan rumah' Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim dalam masa periode jabatannya.

Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dituntut peran aktif menjadi bagian dari solusi akan masalah Pendidikan tersebut.

Sejak awal diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MK-KM) pada tahun 2020. Kebijakan ini, seperti Menteri-menteri pendidikan sebelumnya, juga menimbulkan perdebatan serius, pro-kontra. Kebijakan Merdeka Belajar kemudian mendapatkan momentum adanya pandemi Covid-19, yang mendorong banyak siswa dan guru belajar secara daring (*online*). Di tingkat perguruan tinggi, kebijakan ini kemudian diimplementasikan menjadi (MB-KM) di perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Permasalahan penyebaran wabah pandemi Covid-19 memberi dampak besar terhadap pendidikan di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah mengumumkan instruksi berupa Perintah Kawalan Pergerakan (PnP) kepada seluruh rakyat Malaysia sejak bulan April 2020. Perintah Kawalan Pergerakan tersebut menyebabkan semua aktifitas dibekukan, termasuk kegiatan belajar mengajar pada institusi pendidikan. Proses pembelajaran dan pengajaran secara tatap muka di sekolah dan perguruan tinggi Malaysia dihentikan. Bahkan menjadi tugas guru untuk menyesuaikan diri dengan norma kehidupan baru berupa pengendalian proses pengajaran dan pembelajaran yang saling berhubungan.

Kondisi selama ini, penguasaan pendidik terhadap teknologi digital masih rendah. Menurut Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia (*i-Guru*), Mohd Azizee Hasan, para pendidik khususnya guru, pada masa kini perlu melengkapi diri dengan penguasaan teknologi digital. Para guru juga dituntut menguasai ilmu yang berkaitan dengan '*e-learning*' dalam menyampaikan ilmu kepada siswa. Ia berpendapat: "Guru perlu memiliki paradigma untuk menerima skenario baru pendidikan global dan menyiapkan generasi yang terampil pada teknologi informasi. Hal ini amat penting untuk menyiapkan pelajar dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Pelajar diarahkan bersedia menjadi generasi digital"

(Berita Harian *online*, Selasa, 1 Desember 2020).

Universiti Teknologi MARA, Malaysia mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan berupa *Week Without Wall* (WWW) sejak tahun 2018. Program ini dijalankan selama seminggu pada setiap semester untuk menggalakkan kepada seluruh pengajar dan siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Semua penugasan dan pembelajaran dilakukan memakai aplikasi seperti *Google Classroom*, *Google Meet*, *YouTube*, *Zoom Cloud Meeting*, *Cisco Webex* dan lainnya. Sikap Universiti Teknologi MARA terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan patuh sesuai arahan kerajaan dan universitas agar siap memasuki era digital 4.0.

Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang juga dihadapi oleh pengajar dan siswa, terutama pada Fakultas Seni Lukis dan Seni Reka, Machang, UiTM, karena tidak seluruh bidang seni rupa sesuai dalam kaidah seperti pada seni Reka Tekstil. Permasalahan ini dikarenakan terdapat subyek ajar yang melibatkan proses pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan serta penggunaan laboratorium dan bengkel. Siswa juga menghadapi kesulitan dalam memahami tugas-tugas yang diberikan pengajar, karena proses pembelajaran idealnya dilakukan secara tatap muka.

Permasalahan kebijakan pendidikan lainnya juga terkait dengan era pemerintah yang selalu berganti. Kondisi yang selalu berganti ini, tentu dapat merugikan obyek didik yaitu siswa. Untuk itu perlu ditelusuri akar kata dari kebijakan itu sendiri.

Apakah kebijakan sesungguhnya adalah ilmu dan sebatas arah orientasi politik pemerintah yang berkuasa? Kebijakan sesungguhnya tidak semata hanya sebagai ilmu (Dunn, 1981). Kebijakan secara mendasar juga berorientasi praktis dan praksis di lapangan. Tujuan dari ilmu kebijakan terbuka luas untuk membantu membuat keputusan yang efisien dan efektif. Ilmu kebijakan juga berkontribusi membuat perbaikan pada praktek demokrasi, yang kemudian akan membantu menghasilkan tumbuhnya sepenuhnya harga diri manusia (*human dignity*). Dalam kaitan ini, ilmu kebijakan dapat dipakai sebagai suatu alat kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini manusia itu sendiri. Tujuan dari ilmu kebijakan menurut Horkheimer adalah "*..was not merely to predict through scientific research, what must happen, but to contribute to the establishment of conditions for the gratification of human existence*" (Horkheimer, 1969).

2. Metode

Tulisan ini berawal dari keprihatinan pengajar perguruan tinggi kedua negara Indonesia – Malaysia terhadap situasi wabah pandemi Covid-19. Memakai pendekatan deskriptif-kualitatif, tulisan ini berusaha menggali dan mencari solusi terhadap kondisi pandemi, dengan payung kebijakan (*policy*) setiap negara. Menurut Komarudin, Tjuparmah, Yooke (2007) pengertian deskriptif adalah "Suatu karya tulis prosa yang subyek karangannya dalam pengertian penglihatan. Suatu karangan yang mencatat atau merekam suatu subyek" (2007: 55). Landasan tulisan ini memakai pendekatan deskripsi adalah obyek yang dikaji dipaparkan menurut fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada berupa informasi media elektronik dan cetak terkait pendidikan di masa pandemi.

Pendekatan deskripsi dilakukan dengan memaparkan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia - Malaysia serta menguraikannya secara deskriptif. Konsep deskripsi dapat diterapkan dalam penelitian seni rupa dan desain dengan syarat bahwa topik penelitian menyangkut observasi terhadap obyek yang diteliti (Sumartono, 2018: 13).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber tertulis dari media massa elektronik, surat kabar kedua negara terkait pandemi dan *interview* terhadap pendidikan pengajar di perguruan tinggi kedua negara. Setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis terhadap data kualitatif yang masuk.

4. Pembahasan Hasil

Kata kebijakan dapat dipadankan dengan kata "*policy*" yang berasal dari bahasa Inggris. Secara etimologi, kata *policy* berasal dari bahasa Yunani yaitu "polis" yang berarti kota. Kata *policy* juga ditemukan pada bahasa Sanskerta yaitu "pur" yang berarti kota. Kata *policy* kemudian berkembang dalam bahasa Latin yaitu "*politic*" yang berarti negara. Menurut Oxford Dictionary 2008, kata *policy* memiliki arti perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Asal kata "*policy*" serupa dengan asal kata "*polis*" dan "*politic*" yang keduanya

menunjuk kepada kebijakan dan politik (Wies, 1994).

Kebijakan sebagai payung dasar hukum pada suatu institusi, termasuk perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia, kemudian dapat dikaji untuk menjadi pembanding, khususnya implementasi di tingkat bawah seperti pada perkuliahan batik.

4.1 Batik di UPI, Bandung Indonesia



Gambar 1. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) didirikan sejak tahun 1955, di kota Bandung Jawa Barat. Pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Memiliki 6 kampus yang tersebar di 2 propinsi yaitu Jawa Barat dan Serang, UPI memiliki tenaga pengajar sebanyak 1338 dan jumlah mahasiswa sebanyak 32.769 (pada tahun 2018). Tulisan ini mengkhususkan pada Laboratorium Batik, FPSD, kampus UPI Setiabudhi, Bandung.

Kebijakan pengajaran Batik saat pandemi di Laboratorium Batik UPI, pada intinya mengalami perubahan secara teknis, metode penyampaian, keluaran (*outcomes*), dan pemaparan karya melalui dukungan IoT (*Internet of Things*). Struktur perkuliahan Batik secara mendasar terdiri atas: (1) Pengantar; (2) Persiapan; (3) Praktek; (4) Bimbingan; dan (4) Penilaian.

Pada pada pertama adalah pengantar (*introduction*) yaitu diberikan pemaparan sistem perkuliahan, materi umum, penjelasan tugas, sistem penilaian, hingga metode pameran. Pada tahap pengantar juga dimulai dengan sejarah batik, alat, bahan, dan proses. Perubahan pada tahap pengantar ini adalah materi diberikan secara daring (*online*), melalui SPOT UPI, Zoom, dan dibentuk *Whatsapp* grup Kriya Tekstil dan Batik. Perubahan belajar masa pandemi ini mengharuskan pertemuan tatap

muka ditiadakan di kampus, membuat kuliah dilakukan secara daring. Demikian pula sistem kehadiran kuliah melalui *Google forms* untuk absensi. Tahap ini dilakukan selama 2 pertemuan daring.

Tahap kedua adalah persiapan (*preparation*) yaitu persiapan untuk praktika batik. pada tahap persiapan ini dijelaskan tentang alat dan bahan, proses pengerjaan, hingga teknis bimbingan. Pada tahap ini kendala alat dan bahan seperti canting, kain, malam, kompor, semua diusahakan oleh mahasiswa secara mandiri. Penggunaan laboratorium selama masa pandemi ditiadakan untuk mencegah penyebaran wabah. Untuk mengatasi keterbatasan peralatan ini, pengajar mengizinkan mahasiswa untuk bekerja sama dengan studio, bengkel, workshop batik di tempat terdekat dengan mahasiswa.

Tahap ketiga adalah praktek membatik, yaitu proses kerja eksperimentasi dalam penciptaan batik. Tahap praktek ini memakan waktu cukup lama berkisar 5 minggu dalam proses, termasuk mulai dari penggambaran kain, pencantingan, pencelupan, hingga penjemuran kain batik. Dikaitkan dengan Kebijakan MB-KM, sistem ini memenuhi poin ke-4 yaitu mengganti SKS (Sistem Kredit Semester) menjadi program kerja luar kelas. Pada tahap ini, kerja luar kelas dapat dilakukan dengan studio, bengkel, *workshop* yang membuat batik. Keberadaan mahasiswa peserta batik sendiri tersebar di berbagai kota di Jawa Barat dan Serang, untuk itu kebijakan MB-KM yaitu program kerja luar kelas dapat diterapkan.

Tahap keempat adalah bimbingan (*guidance*), yaitu proses pelaporan kegiatan praktek membatik kepada pengajar. Pada tahap ini, dilakukan kesepakatan antara pengajar dengan mahasiswa, untuk melaporkan setiap kemajuan hasil praktek, mulai dari menggambar di atas kain, mencanting, mewarnai, meluruh lilin malam, hingga hasil akhir. Tahap bimbingan berupa pelaporan karya setiap mahasiswa kepada pengajar melalui teknologi daring seperti SPOT UPI atau Zoom. Perubahan mendasar pada tahap bimbingan adalah proses tatap muka, pertemuan pengajar dan pembimbing secara langsung yang ditiadakan. Kondisi ini sangat berbeda dengan masa sebelum

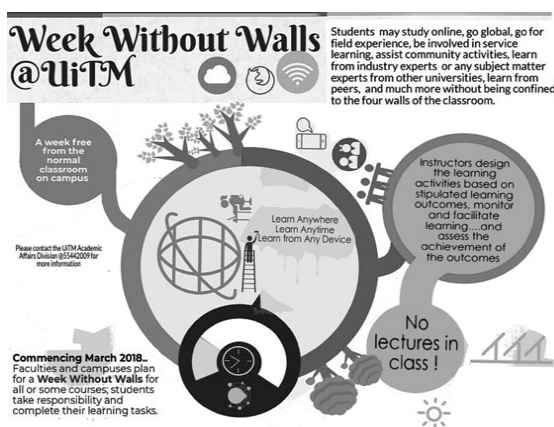
pandemi, yang memudahkan mahasiswa bersama pengajar dapat saling bertukar pengalaman, wawasan, sentuhan perhatian yang menjadi hilang.

Tahap kelima adalah penilaian (*assesment*) berupa penilaian karya-karya mahasiswa melalui pameran virtual (*virtual exhibition*). Penilaian adalah tahap akhir dari kegiatan belajar batik, dimana seluruh mahasiswa memperlihatkan karyanya melalui media IoT seperti pameran virtual (*virtual exhibition*). Pada pameran ini dipergunakan *software* pameran virtual yang dikoordinir oleh mahasiswa seperti ArtStep, Hexafair, vFairs, atau Accelevents. Pada tahap ini seluruh mahasiswa memamerkan karya pada ruang virtual, memberi keterangan karya (*caption*), judul karya, nama, dan deskripsi yang mendukung.

4.1 Pembelajaran Batik, UiTM Malaysia

Era Globalisasi telah mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi prioritas parameter kemajuan Malaysia. Sistem pendidikan tinggi di Malaysia terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan peradaban dunia telah memasuki era berbagai inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi berlangsung sangat cepat (Ilyasir, 2019). Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan IoT (*internet of things*). Era 4.0 ditandai dengan kecenderungan pertukaran data dan otomasi didukung teknologi industri dan manufaktur. Abad ke-21 ditandai dengan munculnya fenomena futuris yang identik dengan masyarakat global paradox dan masyarakat informasi (Naisbitt, 2000).

Secara umum, dampak penerapan kebijakan pembatasan PnP di Malaysia berdampak langsung pada pembelajaran batik di Universiti Teknologi MARA, Machang, Malaysia. Pada program studi Seni Reka Tekstil, khususnya mata pelajaran batik, tidak dapat mencapai 100% keberhasilan kuliah (*course outcome*). Untuk mengatasi hal ini, berbagai cara dan usaha telah dilakukan oleh pelaksana di tingkat program studi dan universitas. Usaha yang telah dilakukan di UiTM adalah mengirimkan materi pembelajaran kepada setiap siswa melalui paket pos, menyewa studio batik di luar kampus, dan mengubah metodologi pembelajaran menjadi lebih ringkas. Usaha ini sedikit banyak dapat selaras dengan tidak mengabaikan tujuan obyektif pembelajaran Batik di Universiti Teknologi MARA dalam bersama menghadapi pandemi Covid-19.



Gambar 2. Week Without Walls UiTM Malaysia

Universiti Teknologi MARA (UiTM) didirikan sejak tahun 1956, memiliki 12 kampus di seluruh negeri bagian Malaysia. Saat ini UiTM memiliki jumlah tenaga pengajar mencapai 1982 tenaga edukatif dan hampir sebanyak 80.000 mahasiswa di seluruh Malaysia. Untuk tulisan ini, dikhususkan hanya pada kampus Universiti Teknologi MARA, wilayah Machang, Malaysia.

Kebijakan *Week Without Walls* (WWW) ini dimulai sejak tahun 2018, khusus pada Universiti Teknologi MARA di seluruh 12 kampus Malaysia. Kebijakan WWW ini bukan berasal dari kementerian pendidikan tinggi Malaysia, namun hanya berlaku pada seluruh 12 kampus Universiti Teknologi MARA dan dapat berbeda antara satu kampus dengan kampus UiTM lainnya. Terobosan kebijakan WWW ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh mahasiswa untuk belajar mandiri, tanpa perlu kehadiran di kelas dan tanpa dosen pendamping di dalamnya. Konsep dasar dari WWW ini adalah: "Belajar dimana saja, dari siapa saja, dan melalui media apa saja" (*learn anywhere, learn anytime, learn from any device*).

Melalui kebijakan WWW ini, setiap mahasiswa dapat belajar daring (*online*) secara mandiri dengan dukungan teknologi informasi dan komputer seperti Google Meet, Zoom, YouTube, Cisco Webex, Whatsapp, Line, dan sebagainya. Termasuk dalam WWW adalah mahasiswa dapat belajar secara internasional dengan mahasiswa di luar Malaysia lainnya seperti Indonesia,

Singapura, Mesir, China, Amerika, dan negara-negara lainnya. Pada kebijakan WWW ini, setiap mahasiswa UiTM juga dapat belajar ke lapangan, berupa 1 minggu di luar kampus, dari 14 minggu yang tersedia selama 1 semester kuliah reguler. Lawatan keluar kampus juga dilakukan terkait dengan WWW seperti ke museum, galeri seni, perpustakaan. Termasuk kegiatan WWW adalah membuat kelompok diskusi kecil (*small group discussion*) di luar kampus.

Program lainnya terkait inovasi pengajaran adalah menggabungkan 5 (lima) mata kuliah berbeda ke dalam 1 mata kuliah gabungan. Selama WWW kegiatan kuliah jarak jauh (*tele conference*) dilakukan secara maksimal, berupa kuliah jarak jauh dengan pengajar China dan Mesir. Kegiatan belajar juga dapat dilakukan bersama mahasiswa sejawat (*peer*) di luar kampus, seperti di daerah sekitar mahasiswa berada, secara berkelompok dan terorganisir dengan pengawasan dari pengajar. Pada program WWW ini peran instruktur adalah merancang aktifitas belajar berdasarkan keluaran stipulated dan memfasilitasi kegiatan belajar mandiri. Instruktur juga mengases pencapaian dari hasil keluaran yang dilakukan oleh setiap mahasiswa.

Kendala dari masa pandemi dalam kegiatan belajar mengajar juga ditemui oleh pengajar dan mahasiswa Universiti Teknologi MARA, Machang, Malaysia yaitu ketercapaian yang tidak dapat mencapai 100% dari kegiatan regular. Dalam bidang praktika batik, capaian keluaran juga diturunkan baik dalam kuantitas jumlah tugas serta kualitas karya. Jumlah tugas yang semula 5 dalam praktika batik, kemudian diturunkan menjadi 3 tugas, dan ukuran karya yang lebih kecil. Kasus ini ditemui pada praktika batik di UiTM wilayah Machang, Malaysia. Untuk mengatasi keterbatasan pemakaian laboratorium universitas yang tutup, ditempuh jalan tengah dengan menyewa studio-studio praktika batik di luar kampus. Namun demikian ikhtiar menyewa studio ini tidak dapat dilakukan di setiap negara bagian Malaysia.

Materi perkuliahan dapat diunduh (*download*) oleh setiap mahasiswa melalui email, *Whatsapp* atau *Telegram*. Namun demikian permasalahan ketersediaan dan kecepatan jaringan internet juga menjadi masalah di Malaysia. Tidak semua negeri di Malaysia memiliki ketersediaan dan kecepatan jaringan yang serupa serta memadai. Waktu pembelajaran menjadi lebih singkat dan lebih fleksibel diikuti oleh seluruh mahasiswa dan pengajar.

5. Kesimpulan

Keberadaan kebijakan pemerintah terkait pendidikan di perguruan tinggi, baik di Indonesia – Malaysia, sejatinya untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Kebijakan pendidikan yang terbit sebelum masa pandemi, kerap dituntut adaptif terhadap kondisi di lapangan. Penerapan aturan PSBB di Indonesia dan PnP di Malaysia bertujuan untuk mencegah penyebaran wabah semakin luas. Demikian pula aturan *Work From Home* di Indonesia dan *Week Without Walls* di Universiti Teknologi MARA, Malaysia adalah satu bentuk adaptasi terhadap realitas.

Kebijakan MB-KM sangat erat dengan politik dalam pendidikan, yaitu seluruh aktivitas Pendidikan memiliki implikasi pada kualitas dan konsekuensi politis. Namun, diperlukan sejumlah penyesuaian (*adjustment*) kebijakan MB-KM ketika diterapkan di perguruan tinggi Indonesia. Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Indonesia dapat mendorong perubahan paradigma belajar batik di perguruan tinggi Indonesia. Proses pembelajaran batik semakin mandiri, didukung teknologi digital seperti YouTube, Zoom, Google, dan lainnya, mendorong pembelajaran tidak berpusat kepada pengajar. Kebijakan pendidikan di Malaysia sedikit berbeda, karena pergantian Perdana Menteri Malaysia yang membuat kebijakan spesifik seperti Kampus Merdeka-Merdeka Belajar tidak dilakukan. Namun demikian, kebijakan pembelajaran batik di Malaysia, khususnya Universiti Teknologi MARA, Machang juga mengalami pengaruh dikarenakan pandemi.

Rekomendasi terkait kebijakan di masa pandemi ini adalah kesiapan seluruh pihak (*stakeholders*) untuk lebih adaptif, inovatif, dan realistis menghadapi fenomena pandemi. Sikap ini diharapkan dimiliki oleh seluruh siswa, pengajar, tata usaha administrasi, hingga masyarakat. Diharapkan sikap inovasi ini juga menghasilkan temuan-temuan baru dalam pembelajaran batik, seperti kolaborasi batik dengan teknologi digital, internet, dan komunikasi.

6. Penghargaan

Penghargaan penulis sampaikan kepada ketua departemen Pendidikan Seni Rupa Dr. Taswadi, M.Sn. dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Mohd. Bakeri Ab. Rahman selaku *Head of Faculty of Art and Design*, Universiti Teknologi MARA, Machang, Malaysia atas dukungan pada karya tulis ini.

7. Pustaka

- Berita Harian *online*, Selasa, 1 Desember 2020, Malaysia.
- Dunn, W.N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Prentice Hall.
- Horkheimer, M., Adorno, T. (1969). *Dialectic of Enlightenment*, 1st edition, Continuum Publisher.
- Ilyasir, F. (2019). Pendidikan Demokratis di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 7(1), 60-74.
- Komaruddin, Tjuparmah, Yooke. (2007). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Merdeka.com. *online*. Konferensi Forum Rektor Indonesia, 4 Juli 2020.
- Sa'ud, U. (2002). *Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Direktori Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sumartono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Seni Rupa dan Desain*. Pusat Studi Reka Rancang Visual dan Lingkungan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Wies, R. (1994). Policy Definition and Classification: Aspects, Criteria, and Examples. *Proceeding of the IFIP/IEEE International Workshop on Distributed Systems: Operations & Management*, Toulouse, France, 10-12 October 1994.